

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva PressAnggara, Sahya. 2015. Kebijakan Publik, Bandung. CV Pustaka Setia.
- Astuti, T. N., Mursalim, M., & Kalsum, U. (2020). Intervening Profitabilitas : Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(4), 607–618
- Chahya, I. G. K., & Kusuma, B. A. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2).
- Faradillahisari, R., Sukur, M. H., Kurniadi, B., & Haris. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, 1(1).
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Kementerian Kesehatan. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Moleong, J Lexy, 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Pambudi, L. S. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), April 2019.
- Putra, M. T., & Afifi, S. (2022). Implementasi Organizational Social Responsibility dalam Membangun Citra BPJS Kesehatan Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Multimedia & Komunikasi*, 7(2), Desember 2022.
- Rahmadana, Muhammad Fitri,dkk.2020.Pelayanan Publik.Medan:Yayasan Kita.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017.
- Sinambela, L. P. (2020). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi (Cetakan ke). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2011).Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Y. M. B. (2023). Tugas Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri 47/IV Kota Jambi. *Administrasi Pendidikan, Universitas Jambi*.

- Tampubolon, K., & Siregar, B. (2023). Analisis Implementasi Sistem Merit bidang Pelayanan Publik di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 30 Juni 2023.
- Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan), Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahyuni, E., & Hertati, D. (Tahun Publikasi). Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. *Journal Publicuho*, 4(2).
- Wijaya, S. (2018). Analisis Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Anggota Kepesertaan BPJS (Studi di Puskesmas Wiyung, Kota Surabaya Tahun 2017). *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), Februari 2018.
- Yuristi. (2013). "Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Pengguna Askes Sosial pada Pelayanan Rawat Inap Di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013". Tana Toraja.